



DPMDPPKB

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



bkkbn

LAPORAN EVALUASI RKPD KONDISI TRIWULAN IV TAHUN 2023



Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756) 21293 email : dpmdppkbpessel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunianya dapat menyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, Kondisi Triwulan IV ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun RKPD dalam kurun waktu 1 Tahun yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 3 Januari 2024

Kepala Dinas,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD 7

 2.1. Metodologi Penilaian Kinerja 7

 2.2. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program,
 Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 7

 2.3. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian
 Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan 8

BAB III PENUTUP 10

 3.1. Kesimpulan 10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkenaan dengan proses penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun RKPD dalam kurun waktu 1 Tahun yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023; telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan periode pelaksanaan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi, yang meliputi : realisasi kinerja per triwulan untuk mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD/DAU dan DAK BKKBN dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, Kondisi Triwulan IV didasarkan kepada pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah, fenomena yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor. Sebagai dokumen perencanaan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target kinerja rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

1. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran strategis pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah,

- indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;
2. Menilai daya serap capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026;
 3. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023;
 4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023;
 5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, yang merupakan Tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026;
 6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum atau latar belakang penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Keterkaitan antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai regulasi pendukung penyusunan Rencana Kerja, dasar hukum terkait RKPD, penjelasan tentang maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD

Bab ini memuat evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), meliputi : target kinerja Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023, capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2022, target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi, realisasi kinerja pada per triwulan, yang terdiri dari : metodologi penilaian kinerja, capaian target kinerja dan penyerapan dana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD, faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta solusi.

BAB III. PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan atau catatan penting yang perlu pengesahan oleh Kepala Perangkat Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran berisikan data dukung terkait Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Kondisi Triwulan IV Tahun 2023.

BAB II

**CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD**

2.1. Metodologi Penilaian Kinerja

Metodologi Penilaian Kinerja yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yaitu : dengan menghitung capaian kinerja menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu mengklasifikasikan penilaian kinerja berdasarkan penilaian dan evaluasi capaian target kinerja rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Realisasi Kinerja		Simbol
	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	T
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	S
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	R
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	SR

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2.2. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sasaran strategis, yaitu : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja; Terwujudnya Keluarga Bahagia; serta Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;

Sebagai OPD yang melaksanakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta juga di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka melaksanakan 2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada RPJMD, Renstra dan Renja. Pelaporan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Kondisi Triwulan IV Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah dioptimalkan sesuai dengan target kinerja, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Implementasi pelaksanaan melalui 7 Program, 13 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Tahun 2023 adalah Rp. 13.923.684.345,-.

Pada Tahun 2023 merupakan Tahun ke-3 periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2023, menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; telah selaras baik dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

2.3. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Meningkatnya Profesionalitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Mulainya penerapan teknologi dengan menggunakan aplikasi, pada beberapa sektor pendukung program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan *stakeholders* dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Masih kurangnya tenaga penyuluh PKB/PLKB di Balai Penyuluh KB yang ditempatkan pada masing-masing Kecamatan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut Ber-KB;
2. Masih kurangnya pengelolaan usaha di Nagari, yaitu : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang masih mengalami kemacetan dalam simpan pinjam di Nagari, sehingga menyebabkan terpengaruhnya Pendapatan Asli Nagari (PAN);
3. Masih kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Nagari, Kecamatan dan Kabupaten secara bertahap dan berjenjang dari Nagari ke Kecamatan hingga ke Kabupaten;
4. Masih kurangnya pemanfaatan Nagari untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Nagari dalam mengembangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Nagari dengan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di Nagari;
5. Rendahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

 Solusi yang telah dilakukan :

1. Meningkatnya Nagari Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mulai Meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN) di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Kondisi Triwulan IV Tahun 2023, dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.801.684.973	Rp. 4.621.848.359	96,25%
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 2.498.200	Rp. 2.486.000	99,51%
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.269.718.332	Rp. 2.257.145.357	99,45%
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 714.466.816	Rp. 707.762.924	99,06%
5.	Pengendalian Penduduk	Rp. 263.400.000	Rp. 225.330.499	85,55%
6.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.483.316.024	Rp. 3.119.893.230	89,57%
7.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.388.600.000	Rp. 2.126.290.000	89,02%
	Total Anggaran (Rp.)	Rp. 13.923.684.345	Rp. 13.060.756.369	93,80%

Sumber Data : Aplikasi SIPD dan SIPKD Realisasi Anggaran Fungsional Bulan Desember Tahun 2023

Dari data realisasi keuangan Bulan Desember Tahun 2023 Uraian Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi Triwulan IV, secara keseluruhan Total Pagu Anggaran Rp. 13.923.684.345 terrealisasi anggaran Rp. 13.060.756.369 dengan capaian kinerja 93,80%. Capaian tersebut tergolong sedang, sehingga diperlukan perhatian dan upaya bersama bidang-bidang agar target akhir Tahun dapat terrealisasikan secara efektif dan efisien.

Gambaran pelaporan pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Kondisi Triwulan IV Tahun 2023 secara lengkap disajikan dalam bentuk Tabel E.81 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; sebagaimana tercantum pada Lampiran Laporan Evaluasi RKPD Kondisi Triwulan IV Tahun 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Tindak Lanjut pada Triwulan IV berikutnya untuk memastikan capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dapat dioptimalkan.

Painan, 3 Januari 2024

KEPALA DINAS,



ZULKIFLI, S.Sos.

NIP.19690218 1993 03 1 003

Tabel E.81 (PMDN 86 / 2017)																															
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH																															
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN																															
Periode Pelaksanaan : TRIWULAN IV TAHUN 2023																															
No.	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)			Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5			6		7		8		I		II		III		IV		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
							Kinerja	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			100	9.417.400.000	100	7.757.717.706	100	7.713.126.555	25	1.703.958.866	25	2.932.030.018	25	1.718.976.693	25	1.860.278.348	100	8.215.243.925	100	15.972.961.631	100	170		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Daerah dilaksanakan			100	5.640.000.000	100	4.897.369.740	100	4.801.684.973	25	974.129.850	25	1.532.989.635	25	973.305.837	25	1.141.423.037	100	4.621.848.359	100	9.519.218.099	100	169	
		2	13	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan			100	4.170.000.000	100	4.026.586.375	100	3.747.991.569	25	719.266.760	25	1.241.763.602	25	773.835.808	25	867.217.368	100	3.602.083.538	100	7.628.669.913	100	183	
		2	13	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	4.000.000.000	12	3.962.862.762	12	3.677.414.665	3	702.383.160	3	1.228.178.146	3	764.685.808	3	836.431.368	12	3.531.678.482	24	7.494.541.244	200	187	
		2	13	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	170.000.000	12	63.723.613	12	70.576.904	3	16.883.600	3	13.585.456	3	9.150.000	3	30.786.000	12	70.405.056	24	134.128.669	200	79	
		2	13	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Perangkat Daerah			100	750.000.000	100	333.241.547	100	491.845.861	25	142.583.712	25	80.425.935	25	117.059.094	25	142.630.750	100	482.699.491	100	815.941.038	100	109	
		2	13	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	80.000.000	4	15.376.000	4	14.513.250	4	4.546.005	4	1.770.000	4	0	4	8.194.500	16	14.510.505	20	29.886.505	500	37	
		2	13	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	250.000.000	2	32.680.930	2	78.668.532	2	42.450.000	2	0	2	29.145.100	2	0	8	71.595.100	10	104.276.030	500	42	
		2	13	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	120.000.000	12	52.989.900	12	66.100.487	3	35.526.210	3	7.340.500	3	7.148.500	3	16.078.500	12	66.093.710	24	119.083.610	200	99	
		2	13	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	12	32.672.100	12	38.352.042	3	3.462.500	3	3.220.715	3	16.309.220	3	15.346.330	12	38.338.765	24	71.010.865	200	89	
		2	13	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	5.000.000	3	4.570.000	3	5.400.000	3	-	3	520.000	3	260.000	3	3.480.000	12	4.260.000	15	8.830.000	500	177	
		2	13	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	12	35.000.000	12	20.033.000	3	19.998.000	3	2.464.000	3	7.194.000	3	2.569.600	3	6.930.000	12	19.157.600	24	39.190.600	200	112	
		2	13	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	174.919.617	3	268.813.550	3	54.134.997	3	60.380.720	3	61.626.674	3	92.601.420	12	268.743.811	24	443.663.428	200	246	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)			Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab							
													1	2	3	4	5			6							7		8		9		10
Kinerja	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.						
		2	13	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Daerah					100	190.000.000	100	202.559.470	100	278.931.543	25	49.155.078	25	66.910.098	25	64.030.835	25	86.616.469	100	266.712.480	100	469.271.950	100	247	
		2	13	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000	12	27.665.070	12	46.681.755	3	9.628.329	3	10.660.098	3	8.337.835	3	10.066.469	12	38.692.731	24	66.357.801	200	66			
		2	13	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000	12	174.894.400	12	232.249.788	3	39.526.749	3	56.250.000	3	55.693.000	3	76.550.000	12	228.019.749	24	402.914.149	200	448			
		2	13	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik					100	530.000.000	100	334.982.348	100	282.916.000	25	63.124.300	25	143.890.000	25	18.380.100	25	44.958.450	100	270.352.850	100	605.335.198	100	114	
		2	13	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	1	0	1	38.000.000	1	18.250.000	1	4.950.000	1	6.024.000	1	7.059.250	4	36.283.250	5	36.283.250	500	0			
		2	13	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	300.000.000	12	311.122.348	12	210.850.000	3	28.618.800	3	138.840.000	3	10.656.100	3	24.299.200	12	202.414.100	24	513.536.448	200	171			
		2	13	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	80.000.000	12	6.360.000	12	7.750.000	3	1.500.000	3	0	3	1.300.000	3	4.950.000	12	7.750.000	24	14.110.000	200	18			
		2	13	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	17.500.000	1	26.316.000	1	14.755.500	1	100.000	1	400.000	1	8.650.000	4	23.905.500	5	41.405.500	500	28			
		2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Antar Desa					100	280.000.000	100	36.549.200	100	36.549.200	25	1.921.000	25	0	25	565.000	25	0	100	2.486.000	100	39.035.200	100	14	
		2	13	03	2.01		Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa					100	280.000.000	100	36.549.200	100	36.549.200	25	1.921.000	25	0	25	565.000	25	0	100	2.486.000	100	39.035.200	100	14	
		2	13	03	2.01	02	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	15	280.000.000	15	36.549.200	15	2.498.200	15	1.921.000	15	0	15	565.000	15	0	60	2.486.000	75	39.035.200	500	14			
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki Pengelolaan Administrasi yang Baik					100	2.897.400.000	100	2.218.624.716	100	2.269.718.332	25	13.441.200	25	1.081.576.850	25	561.547.200	25	600.580.107	100	2.257.145.357	100	4.475.770.073	100	154	
		2	13	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					100	2.897.400.000	100	2.218.624.716	100	2.269.718.332	25	13.441.200	25	1.081.576.850	25	561.547.200	25	600.580.107	100	2.257.145.357	100	4.475.770.073	100	154	
		2	13	04	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	182	2.157.400.000	182	1.976.312.001	182	2.104.334.284	182	0	182	1.049.795.400	182	522.090.800	182	525.636.885	728	2.097.523.085	910	4.073.835.086	500	189			

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)			Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab							
												I		II		III		IV													
				1	2	3			4	Kinerja		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
		2	13	04	2.01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	182	90.000.000	182	35.313.950	182	10.199.954	182	515.000	182	3.169.000	182	3.055.000	182	3.409.000	728	10.148.000	910	45.461.950	500	51	
		2	13	04	2.01	04	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	182	90.000.000	182	64.231.520	182	82.870.600	182	7.114.800	182	9.405.650	182	12.293.000	182	50.047.622	728	78.861.072	910	143.092.592	500	159	
		2	13	04	2.01	05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	182	120.000.000	182	40.413.895	182	16.013.800	182	0	182	7.306.800	182	4.874.000	182	2.552.000	728	14.732.800	910	55.146.695	500	46	
		2	13	04	2.01	08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	15	230.000.000	15	56.114.600	15	16.000.000	15	3.916.400	15	1.650.000	15	7.288.400	15	3.070.000	60	15.924.800	75	72.039.400	500	31	
		2	13	04	2.01	11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	182	150.000.000	182	15.219.500	182	8.699.819	182	0	182	5.565.000	182	870.000	182	2.006.000	728	8.441.000	910	23.660.500	500	16	
		2	13	04	2.01	12	Sub Kegiatan Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	182	60.000.000	182	31.019.250	182	31.599.875	182	1.895.000	182	4.685.000	182	11.076.000	182	13.858.600	728	31.514.600	910	62.533.850	500	104	
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Dasawisma Maju			100	600.000.000	100	605.174.050	100	605.174.050	25	714.466.816	25	317.463.533	25	183.558.656	25	118.275.204	100	1.333.764.209	100	1.938.938.259	100	323	
		2	13	05	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif			100	600.000.000	100	605.174.050	100	714.466.816	25	88.465.531	25	317.463.533	25	183.558.656	25	118.275.204	100	707.762.924	100	1.312.936.974	100	219	
		2	13	05	2.01	01	Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	37	120.000.000	37	20.766.600	37	7.025.817	37	0	37	2.310.000	37	4.100.000	37	538.070	148	6.948.070	185	27.714.670	500	23	
		2	13	05	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	182	155.000.000	182	48.472.950	182	5.299.917	182	0	182	4.042.950	182	1.235.000	182	0	728	5.277.950	910	53.750.900	500	35	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	SKPD Penanggung Jawab											
								I				II				III								IV										
								9		10		11		12		13		14 = 7 +13						15 = 14/6 X 100 %										
1	2	3					4	5			6			7			8			9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16
							Kinerja	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			2	13	05	2.01	05	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	50	90.000.000	50	40.317.950	50	2.498.200	50	0	50	2.458.400	50	0	50	0	200	2.458.400	250	42.776.350	500	48			
			2	13	05	2.01	07	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	80.000.000	1	101.091.750	1	199.643.132	1	15.364.200	1	183.525.945	1	0	1	0	4	198.890.145	5	299.981.895	500	375			
			2	13	05	2.01	09	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	15	155.000.000	15	394.524.800	15	499.999.750	15	73.101.331	15	125.126.238	15	178.223.656	15	117.737.134	60	494.188.359	75	888.713.159	500	573			
2.	Terwujudnya Keluarga Bahagia		2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				100	4.256.745.000	100	1.933.858.530	100	6.135.316.024	25	665.026.684	25	1.025.220.350	25	1.896.719.745	25	1.884.546.950	100	5.471.513.729	100	7.405.372.259	100	174	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan		
			2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk			100	134.745.000	100	109.430.830	100	263.400.000	25	18.823.229	25	30.541.850	25	81.320.170	25	94.645.250	100	225.330.499	100	334.761.329	100	248			
			2	14	02	2.02		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah			100	134.745.000	100	109.430.830	100	263.400.000	25	18.823.229	25	30.541.850	25	81.320.170	25	94.645.250	100	225.330.499	100	334.761.329	100	248			
			2	14	02	2.02	11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	2.745.000	1	2.745.000	1	109.200.000	1	0	1	0	1	47.100.000	1	62.100.000	4	109.200.000	5	111.945.000	500	4.078			
			2	14	02	2.02	13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	132.000.000	1	106.685.830	1	154.200.000	1	18.823.229	1	30.541.850	1	34.220.170	1	32.545.250	4	116.130.499	5	222.816.329	500	169			
			2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR)			100	4.122.000.000	100	1.824.427.700	100	3.483.316.024	25	550.353.455	25	493.948.500	25	936.089.575	25	1.139.501.700	100	3.119.893.230	100	4.944.320.930	100	120			
			2	14	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Jenis Media KIE yang diadakan			100	1.222.000.000	100	634.628.200	100	1.307.250.024	25	176.065.605	25	172.243.700	25	416.389.100	25	388.612.000	100	1.153.310.405	100	1.787.938.605	100	146			
			2	14	3	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Sesuai kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	120.000.000	1	25.000.000	1	230.000.024	1	62.246.805	1	2.028.000	1	98.409.800	1	31.979.400	4	194.664.005	5	219.664.005	500	183			

No.	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)			Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab		
																	I		II		III		IV										
																	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.
1	2	3					4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16		
				2	14	3	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	0	1	70.252.000	1	195.000.000	1	13.082.000	1	3.878.400	1	62.578.000	1	80.554.000	4	160.092.400	5	230.344.400	500	0	
				2	14	3	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB)	Jumlah Laporan Hasil Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB)	Laporan	15	1.102.000.000	15	454.211.500	15	722.250.000	15	100.736.800	15	129.642.300	15	187.484.100	15	220.712.400	60	638.575.600	75	1.092.787.100	500	99	
				2	14	3	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	0	1	85.164.700	1	160.000.000	1	0	1	36.695.000	1	67.917.200	1	55.366.200	4	159.978.400	5	245.143.100	500	0	
				2	14	03	2.02		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			100	900.000.000	100	620.800.000	100	380.000.000	25	15.350.000	25	80.500.000	25	99.250.000	25	165.000.000	100	360.100.000	100	980.900.000	100	109	
				2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	60	900.000.000	60	620.800.000	60	380.000.000	60	15.350.000	60	80.500.000	60	99.250.000	60	165.000.000	240	360.100.000	300	980.900.000	500	109	
				2	14	03	2.03		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			100	1.850.000.000	100	528.597.750	100	996.566.000	25	285.132.250	25	128.502.400	25	199.105.475	25	295.569.100	100	908.309.225	100	1.436.906.975	100	78	
				2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Laporan	12	950.000.000	12	11.699.000	12	32.707.874	3	11.465.450	3	3.272.000	3	10.228.505	3	7.569.500	12	32.535.455	24	44.234.455	200	5	
				2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan penggunaan metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	250	900.000.000	250	516.898.750	250	913.002.126	62	268.648.800	62	118.880.400	62	172.402.470	62	269.252.800	248	829.184.470	498	1.346.083.220	199	150	
				2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	0	12	0	12	47.100.000	3	5.018.000	3	6.350.000	3	16.474.500	3	18.746.800	12	46.589.300	24	46.589.300	200	0	
				2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	3	0	3	0	3	3.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	100	0	

